

**SEJARAH PEMEKARAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**Tahun 1999-2010**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**YULIA RESHA PERTIWI**  
**I1A113013**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JAMBI  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010” yang disusun oleh Yulia Resha Pertiwi, NIM. 11A113013 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2017

Dewan Penguji :

1. Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd  
NIP. 195709181985031004

Ketua

1.

2. Apdelmi, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198508172015041002

Sekretaris

2.

3. Drs. Budi Purnomo, M. Hum  
NIP. 19610381986031004

Penguji Utama

3.

4. Abdurahman, S.Pd, MA  
NIDK. 201609091005

Anggota

4.

5. Denny Defrianti, S.Sos., M.Pd  
NIDK. 201501092005

Anggota

5.

Jambi, Juli 2017

Mengetahui,

Ketua Prodi

Siti Syuhada, S.Pd, ME

NIP. 198101092005012002

Mengesahkan

Dekan FIB Universitas Jambi

Prof. H. Yundi Fitrah, Drs., M.Hum., Ph.D

NIP. 195912251989021002

**SEJARAH PEMEKARAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
Tahun 1999-2010**

**SKRIPSI**

**ABSTRAK**

Pertiwi. Yulia Resha. 2017. *Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 1999-2010*. Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, FIB Universitas Jambi, Pembimbing: (1) Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd, (2) Apdelmi S.Pd, M.Pd.

Penelitian ini menjelaskan mengenai awal proses terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dahulunya kabupaten ini masuk ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung berada di Kuala Tungkal. Seiring dengan bergulirnya era desentralisasi daerah dimana daerah diberi wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan undang-undang No 54 tanggal 4 oktober 1999 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Tanjung Jabung melakukan pemekaran wilayah menjadi dua bagian wilayah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembahasan yang di kaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana sejarah lahirnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagaimana perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terjadinya pemekaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, kritik sumber, penafsiran dan penulisan sejarah.

Hasil dari penelitian ini adalah perlunya Tanjung Jabung Timur dimekarkan dari Kabupaten Tanjung Jabung, hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Daerah- daerah yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur yang sangat jauh dari kabupaten induk, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan pelayanan birokrasi dan administrasi. Dilihat dari perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Setelah terjadinya pemekaran mengalami perkembangan sehingga kabupaten ini dinobatkan sebagai kabupaten pemekaran terbaik di Indonesia oleh bapak menteri dalam negeri pada masa itu, ini di karenakan pemerintah kabupaten tersebut melakukan pembangunan besar-besaran untuk mendobrak isolasi daerah yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Kata kunci** : Pemekaran, Perkembangan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang menggantikan era orde baru mempunyai dampak positif dan negatif yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti transparansi penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah diberikan otonomi yang lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem otonomi daerah sendiri tercantum dalam pasal 18 yang menyebutkan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Sistem otonomi daerah dikenal dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Desentralisasi juga sebagian besar keputusan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintah, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi

politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa desentralisasi suatu daerah mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah dan desentralisasi itu sendiri difaktori oleh beberapa hal diantaranya seperti pelaku pemerintahan dan bentuk kebijakan otonominya, mengingat kondisi pertumbuhan negara Indonesia di topang oleh bagaimana pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia.

Desentralisasi pemerintah dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonom kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>4</sup>

Kondisi otonomi daerah selama ini terutama pada daerah tingkat II, masih semu karena kemandirian yang dicita-citakan berbalik menjadi ketergantungan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1. Hak otonomi yang diperlukan sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, belum dapat direalisasikan mengakibatkan daerah otonom selalu dalam kondisi dan posisi yang serba riku. Keadaan seperti ini tentu saja tidak dapat dipertahankan terus menerus apabila kita ingin maju sesuai dengan perkembangan iptek yang cepat dan era globalisasi. Pembentukan daerah- daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang dianut berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Daerma Sinaga. *Pemekaran Daerah Sebagai Upaya Pembentukan Daerah Otonomi : Studi kasus Kabupaten Asahan dan Batu Bara*. Skripsi. Diambil dari [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), pada tanggal 01 Februari 2017 jam 10.00 WIB

<sup>2</sup> Rizky Argama. *Pemberlakuan Otonomi Daerah Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia*. Makalah. Diambil dari [www.jdih.sumselprov.go.id](http://www.jdih.sumselprov.go.id), pada tanggal 03 Maret 2017 jam 10.00 WIB

<sup>3</sup> Mudjarad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga 2004. Hal 4-6

<sup>4</sup> Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA. 2015. Hal 75-76

<sup>5</sup> Albert Hasibuan. DKK. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Cet 1. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1995. Hal 3-4

Menurut Eko Budiharjo mengatakan dari prespektif kewilayahan, terminologi “pemekaran” merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran yang terjadi justru penciutan atau penyempitan wilayah. Hal ini terjadi karena pemekaran di Indonesia adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom, sehingga yang terjadi justru penyempitan wilayah. Pemekaran jarang dipahami sebagai penggabungan dua atau lebih daerah otonom untuk membentuk satu daerah otonom baru.<sup>6</sup>

Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (*eupheisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. Istilah pemekaran daerah kadang silih berganti dipakai untuk menggantikan istilah pembentukan daerah. Hal ini dikarenakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama meskipun sebenarnya istilah pembentukan daerah memiliki makna berbeda dengan pemekaran daerah.<sup>7</sup>

Kebijakan pemekaran daerah pada masa reformasi bersifat *bottom up* dan didominasi oleh proses politik dari pada administratif. Regulasi dan situasi politik inilah yang kemudian memberikan peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekaran daerah.

Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Pemekaran daerah juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Berdasarkan pengalaman dimasa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibu kota pemerintahan daerah.<sup>8</sup>

Pemekaran daerah diharapkan akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil serta diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Nike Retno Herawati. *Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Diambil dari [www.ejournal.undip.ac.id](http://www.ejournal.undip.ac.id), pada tanggal 01 Februari 2017, jam 15.30 WIB

<sup>7</sup> Nike Retno Herawati. *Ibid.* Hal 2

---

<sup>8</sup> Nike Desilvia. *Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh*. Tesis. Diambil dari [www.scholar.unand.ac.id](http://www.scholar.unand.ac.id), pada Tanggal 28 November 2016, jam 14.00 WIB

<sup>9</sup> Nike Retno Herawati. *Ibid.* Hal 1



## BAB II KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SEBELUM PEMEKARAN

### 1.1. Kondisi Geografis dan Topografis

Tahun 1998 sebelum terjadinya pemekaran wilayah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk kedalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibukota Kuala Tungkal memiliki luas 10.948.50 km<sup>2</sup>, berbeda dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo yang mempunyai luas 11.120 km<sup>2</sup>, Kabupaten Batanghari dengan luas daerah 11.130 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kerinci dengan luas hanya 3.808,5 km<sup>2</sup>, berbeda dengan Kabupaten Sarolangun Bangko yang memiliki luas wilayah 13.863 km<sup>2</sup> yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi.<sup>10</sup>

Kabupaten Tanjung Jabung adalah salah satu kabupaten dari 6 (enam) kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi, yang terletak di bagian timur Pantai Sumatera dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung berawa yang dikenal dengan daerah pasang surut. Alat transportasi dari ibukota Kabupaten yaitu Kuala Tungkal ke wilayah kecamatan, sebagian besarmenggunakan kendaraan air, seperti kapal motor, speed boat, perahu bermotor dengan sebutan pompong.<sup>11</sup>

Kabupaten Tanjung Jabung terletak antara 0<sup>o</sup> 45- 1<sup>o</sup> 40 Lintang Selatan dan antara 102<sup>o</sup> 28- 104<sup>o</sup> 30 Bujur Timur. Kabupaten Tanjung Jabung memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang

Hari dan Kabupaten Bungo Tebo dan sebelah timur berbatasan dengan selat berhala dari laut china selatan.<sup>12</sup>



*Ket : Peta Kabupaten Tanjung  
Jabung Tahun 1998*

Selain memiliki batas-batas wilayah, Kabupaten Tanjung Jabung memiliki jarak dari ibukota Kabupaten Tanjung Jabung ke beberapa kota dalam Provinsi Jambi seperti : Jambi lewat darat memiliki jarak 125 km, Muara bulian lewat Bajubang Laut memiliki jarak 181 km, Muara Bulian Lewat Bajubang Darat memiliki jarak 190 km, Bungo lewat Sarolangun memiliki jarak 373 km, Muaro Bungo lewat Bajuang Laut memiliki jarak 356 km, dan Sungai Penuh lewat Bangko memiliki jarak 543 km.<sup>13</sup>

Untuk semua wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung sepanjang Tahun 1998 rata-rata memiliki curah hujan, bulan basah 168-405 mm dan bulan kering 53-102 mm.<sup>14</sup>

### 1.2. Sistem Pemerintahan

Tahun 1946 sebelum Provinsi Jambi memiliki daerah keresidenan sendiri, Provinsi Jambi termasuk kedalam wilayah Sumatera Tengah, dimana Sumatera yang semula hanya memiliki 1 ( satu ) provinsi, kemudian dibagi menjadi tiga provinsi berdasarkan keputusan sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) yang melakukan pertemuan di daerah Bukit Tinggi. Pada pertemuan tersebut para residen Se-Sumatera memutuskan untuk membagi

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang No.54 tahun 1999. tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

<sup>11</sup> Lindayanti, DKK. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*. Jambi : Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi. 2014. Hal 97

<sup>12</sup> BPS ( Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung). Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 1999

<sup>13</sup> BPS ( Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung). Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 1998

<sup>14</sup> Diambil dari [www.PemkabTanjungJabungTimur.go.id](http://www.PemkabTanjungJabungTimur.go.id), pada Tanggal 02 Juni 2017 jam 14.00 WIB

Provinsi Sumatera menjadi 3 sub provinsi, masing-masing adalah<sup>15</sup> :

1. Sumatera Utara mencakup keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
2. Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
3. Sumatera Selatan mencakup keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.

Dua tahun setelah kesepakatan para residen Se-Sumatera, maka pemerintah pusat menjadikan ke tiga sub Provinsi tersebut menjadi provinsi definitive yang di setujui pada tanggal 15 April 1948.

Tahun 1957 Provinsi Sumatera Tengah mengakhiri keberadaannya dan kemudian membaginya menjadi tiga provinsi yang berdiri sendiri, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Bukit Tinggi
2. Provinsi Riau dengan Ibukota Tanjung Pinang
3. Provinsi Jambi dengan Ibukota Jambi

Adapun rincian kabupaten yang dimiliki oleh masing-masing provinsi yang baru dibentuk itu adalah :

1. Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Bukit Tinggi meliputi wilayah-wilayah :

**a. Kabupaten**

- Agam
- Padang Pariaman
- Solok
- Pasaman
- Sijunjung
- Li mapuluh Kota
- Tanah Datar
- Pesisir Selatan/Kerinci, di kurangi dengan wilayah kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir

**b. Kota Praja**

- Bukit tinggi

- Padang
- Sawahlunto
- Padang Panjang
- Solok
- Payakumbuh<sup>16</sup>

2. Provinsi Riau dengan Ibukota Tanjung Pinang meliputi wilayah-wilayah :

**c. Kabupaten**

- Bengkalis
- Kampar
- Indragri
- Kepulauan Riau

**d. Kota Praja**

- Pekanbaru

3. Provinsi Jambi dengan Ibukota Jambi yang meliputi wilayah-wilayah :

**e. Kabupaten**

- Batang Hari
- Merangin

**f. Kota Praja**

- Jambi

Pembentukan tiga Provinsi baru ini menghidupkan kembali tiga keresidenan lama, yakni Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Namun terdapat pengurangan wilayah terhadap Sumatera Barat. Sebagian daerahnya di Kerinci dan Bangkinang dikeluarkan. Kerinci dimasukkan ke Provinsi Jambi dan Bangkinang di masukkan ke Provinsi Riau.<sup>17</sup>

Setelah tiga Provinsi ini di bentuk, pada tanggal 6 Januari 1958, keresidenan Jambi menjadi Provinsi tingkat 1 Jambi yang meliputi wilayah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Pembentukan Provinsi ini membuat kegiatan pusat pemerintahan mengalami perpindahan, di karenakan terjadinya perpindahan pusat administrasi yang menjadikan Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan Provinsi.

<sup>15</sup> Gusti Asnan. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari Voc Hingga Reformasi*. Yogyakarta : Citra Pustaka 2006. Hal 129

<sup>16</sup> Gusti Asnan *Ibid*. Hal 130

<sup>17</sup> Gusti Asnan. *Ibid*. Hal 141

Tahun 1965 wilayah Kabupaten Batang Hari di pecah menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu :

1. Kabupaten Batang Hari dengan Ibukota Kenali Asam.
2. Kabupaten Tanjung Jabung dengan Ibukota Kuala Tungkal.

Kabupaten Tanjung Jabung di resmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 dimana Kabupaten tersebut memiliki 4 ( empat ) kecamatan, yaitu : Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Nipah Panjang.<sup>18</sup>

Pada saat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergabung dalam Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten ini memiliki logo atau lambang daerah sebagai identitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari. Adapun makna logo/lambang Kabupaten Tanjung Jabung adalah :

1. Lambang Kabupaten Tanjung Jabung terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
  - Bidang Dasar Lambang
  - Bidang Persegi Lima
  - Perahu Layar Dengan Layar Persegi Tiga
  - Bambu Runcing
  - Gelombang
  - Padi Dan Daun Kelapa
  - Rantai
  - Gong
  - Sawah Berpetak Sembilan
  - Pita Merah
  - Motto/Tulisan
  - Huruf-Huruf Tanjung Jabung
  - Arti Kiasan Lambang Tanjung Jabung
  - Bidang Dasar Lambang berbentuk perisai persegi lima melambangkan jiwa dan semangat pancasila dari

rakyat Kabupaten Tanjung Jabung<sup>19</sup>

- Bintang Persegi Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyinari dan menyoroti Lambang seluruh yang berarti bahwa rakyat Kabupaten Tanjung Jabung berketuhanan Yang Maha Esa dan pemeluk agama yang bertaqwa<sup>20</sup>
- Perahu layar melambangkan biduk yang menurut sejarah rakyat yang pertama-tama datang ke daerah ini memakai biduk yang bernama “Lancang Kuning” dan selanjutnya melambangkan alat pengangkut utama di daerah Kabupaten Tanjung Jabung
- Bambu Runcing sebagai Tiang Layar melambangkan sifat-sifat patriotik, keberwiraan dan kepahlawanan dari rakyat Kabupaten Tanjung Jabung dalam memantang penjajahan.
- Gelombang berbentuk Garis Putih bergelombang delapan buah melambangkan bahwa daerah ini terletak di tepi laut dan rakyat mempunyai sifat dinamis bergerak terus serta menggambarkan bulan diresmikannya Kabupaten Tanjung Jabung pada bulan Agustus
- Padi dan daun kelapa melambangkan unsur-unsur kemakmuran yang dihasilkan di daerah ini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat di lambangkan bagi kemakmuran bangsa dan negara
- Jumlah buah padi sebanyak 19 butir dan daun Kelapa enam helai, karena lima helai (65) menggambarkan tahun berdirinya/ diresmikannya Kabupaten Tanjung Jabung tahun 1965
- Rantai melambangkan ikatan, persatuan serta kerukunan

<sup>18</sup> Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. *Selayang Pandang Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Jambi : Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi. 2006. Hal 2

<sup>19</sup> BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung). *Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 1998*

<sup>20</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung. *Ibid*. Hal 10



rakyat Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia

- Rantai yang terdiri dari sepuluh buah mata rantai menggambarkan tanggal berdirinya atau diresmikannya Kabupaten Tanjung Jabung pada tanggal 10 agustus 1965
- Gong berlingkaran tiga melambangkan bahwa dari provinsi Jambi (Sepucuk Jambi Sembilan Lurah), seklaigus merupakan manifestasi kebudayaan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung yang melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat “BULAT AIR DEK PEMBULUH BULAT KATO DEK MUFAKAT”
- Sawah berpetak Sembilan berwarna hijau yang terletak di antara tangkai padi dan daun kelapa dihubungkan dengan rantai melambangkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung adalah daerah agraris yang subur serta menggambarkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah<sup>21</sup>
- Pita meta melambangkan turut aktifnya rakyat Kabupaten Tanjung Jabung didalam menentang penjajahan kezaliman pada masa perang kemerdekaan
- Motto atau tulisan warna putih dalam pita merah yang berbunyi “BHAKTI KARYA BINA KARTA” yang melambangkan ketinggian dan kebulatan tekat dari rakyat Kabupaten Tanjung Jabung untuk senantiasa dengan itikat jujur menyumbang Dharma Baktinya amal ibadah bagi kepentingan dan kemajuan rakyat dalam membangun daerah demi tercapainya keadilan dan kemakmuran

2. Arti kiasan warna yang dipakai dalam lambang Kabupaten Tanjung Jabung :

- Biru : menggambarkan masa depan yang gemilang dan melambangkan pula bahwa rakyat daerah ini mempunyai sifat gigih dan ulet dalam memperjuangkan cita-citanya untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil, bahagia dan makmur

Kuning : melambangkan kemuliaan dan keagungan serta menggambarkan ketegasan dan keyakinan dalam melanjutkan tujuannya dan pembangunan yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan UUD 19454

- Putih : melambangkan kesucian, kebenaran dan keadilan
- Hijau: melambangkan kemakmuran daerah serta menggambarkan kejujuran, simpatik dan toleransi rakyat Kabupaten Tanjung Jabung
- Merah : melambangkan sifat rakyat Kabupaten Tanjung Jabung yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Demi pembangunan daerah bangsa dan negara, berdasarkan filsafah Pancasila dan UUD 1965



*Ket : Logo atau Lambang Kabupaten Tanjung Jabung*

Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung pada saat itu berpusat di Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung yaitu Kuala Tungkal, sehingga untuk wilayah bagian timur seperti Kecamatan Muara Sabak dan Nipah Panjang menempuh jarak cukup

<sup>21</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung. *Ibid.* Hal 12

jauh untuk sampai ke pusat pemerintahannya. Keadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan pada saat itu sangatlah memprihatinkan, karena apabila hujan turun untuk mencapai lokasi pusat pemerintahan di Kuala Tungkal membutuhkan waktu yang cukup lama sampai sehari semalam dan apabila dengan kondisi yang cukup baik membutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai pusat pemerintahan.<sup>22</sup>

Dalam masa pembangunan sekarang ini usaha pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung terus giat melaksanakan kegiatan pembangunan, diantaranya sektor perhubungan jalan darat yang meghubungkan dari ibukota Kuala Tungkal ke Provinsi Jambi. Dalam usaha ini pada tahun 1985 telah dapat dilalui dengan kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor, hal ini merupakan suatu kebanggaan dari masyarakat Tanjung Jabung karena selama ini menjadi impian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung untuk dapat menikmati fasilitas jalan darat. Walaupun kondisi dan situasi jalan darat hanya baru dapat di nikmati pada musim-musim tertentu, yaitu musim panas, namun pembangunan terus di tingkatkan dan dalam tahun 1986 jalan darat sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda 4 (empat) dengan ukuran berat kendaraan tertentu.<sup>23</sup>

Sementara itu untuk jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Pada tahun 1990an, Kabupaten Tanjung Jabung memiliki jumlah penduduk 364,036 jiwa dan kepadatan penduduk 33 km<sup>2</sup>. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 1961, tahun 1971 dan tahun 1980an, Kabupaten Tanjung Jabung mengalami peningkatan jumlah penduduk. Seperti tahun 1961 sebelum terjadinya pemecahan kabupaten oleh Kabupaten

Batang Hari , Tanjung Jabung memiliki jumlah penduduk 117.340 jiwa, di tahun 1971 setelah terjadinya pemecahan dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung memiliki jumlah penduduk berkisar 215.496 jiwa dan di tahun 1980 Kabupaten Tanjung Jabung memiliki jumlah penduduk 302.136 jiwa.<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung). Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 1985

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung. *Ibid.* Hal 6

---

<sup>24</sup> BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung). Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 1990